

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Foto Wawancara Penelitian di Desa Bangunjiwo



(Kantor Lurah Desa Bangunjiwo)



(Lurah Desa Bangunjiwo)



(Kaur Keuangan Desa Bangunjiwo)



(Tokoh Masyarakat Desa Bangunjiwo)



(Kaur Umum Desa Bangunjiwo)

B. Dokumentasi Foto Wawancara Penelitian di Desa Ngestiharjo



(Kantor Lurah Desa Ngestiharjo)



(Kabag Perencanaan Desa Ngestiharjo)



(Kabag Keuangan Desa Ngestiharjo)

(Tokoh Masyarakat Desa Ngestiharjo)

DAFTAR PERTANYAAN

1. Partisipasi Masyarakat

- a. Bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa?
- b. Apa saja bentuk-bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap perencanaan?
- c. Program apa saja yang didapat masyarakat dari hasil perencanaan tersebut?
- d. Biasanya ada kendala apa saja dalam tahap perencanaan ini?
- e. Menurut Bapak/Ibu sudah sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan?
- f. Bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan?
- g. Apa saja bentuk-bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan ini?
- h. Dalam pelaksanaan pembangunan. Program pembangunan apa saja yang dilaksanakan oleh masyarakat?
- i. Biasanya ada kendala apa saja dalam tahap pelaksanaan pembangunan ini?
- j. Menurut Bapak/Ibu sudah sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan?
- k. Apakah dalam tahap evaluasi ada masyarakat yang terlibat?
- l. Bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi ini?
- m. Apa saja bentuk-bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat pada tahap evaluasi ini?
- n. Menurut Bapak/Ibu sudah sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi?

2. Transparansi Pemerintah Desa

- a. Apakah ada pengumuman kebijakan anggaran yang dilakukan pemerintah desa?
- b. Bentuk-bentuk pengumuman kebijakan anggarannya seperti apa?
- c. Masyarakat tahu tidak dengan adanya pengumuman kebijakan anggaran yang dilakukan pemerintah desa?
- d. Apakah ada dokumen anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat? Misalnya seperti melalui *website*, papan pengumuman anggaran dan lain sebagainya?
- e. Kalau ada bentuk implementasinya seperti saja?
- f. Apakah ada sistem pemberian informasi anggaran yang dilakukan ke masyarakat?
- g. Bentuk pemberian informasi anggarannya seperti apa?

3. Pengelolaan Keuangan Desa

- a. Bagaimana proses penganggaran APBDes?
- b. Siapa saja yang terlibat dalam proses penganggaran APBDes tersebut?
- c. Apa yang menjadi acuan pemerintah desa dalam melaksanakan penganggaran APBDes?
- d. Kapan pelaksanaan penganggaran APBDes dilakukan?
- e. Bagaimana proses pelaksanaan APBDes?
- f. Kapan pelaksanaan APBDes dilakukan?
- g. Siapa saja yang terlibat dalam proses pelaksanaan tersebut?
- h. Bagaimana proses monitoring dan evaluasi APBDes?
- i. Kapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi APBDes dilakukan?
- j. Siapa saja yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi APBDes tersebut?
- k. Ada kendala tidak dalam melakukan monitoring dan evaluasi APBDes?



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 3165 / S1 / 2017

Menunjuk Surat : Dari : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY Nomor : 2/A.2-VIII/X/2017
Tanggal : 05 Oktober 2017 Perihal : Izin Penelitian

Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada
Nama : **POSTA ARWANTO**
P. T / Alamat : **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMY Yogyakarta**
NIP/NIM/No. KTP : **1704021902940001**
Nomor Telp./HP : **085267244294**
Tema/Judul Kegiatan : **PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DESA BANGUNJIWO DAN DESA NGESTIHARJO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016)**

Lokasi : **BKAD, Bagian Pemdes Sekretariat Daerah, Desa Bangunjiwo, Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan**
Waktu : **10 Oktober 2017 s/d 10 Januari 2018**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 10 Oktober 2017

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Pengendalian
Penelitian dan Pengembangan u.b.
Kasubid Pengendalian

ANGGIT NUR HIDAYAT, SH, M.AP
NIP: 19780918-199803 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul
4. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
5. Camat Kasihan
6. Lurah Desa Bangunjiwo, Kec. Kasihan
7. Lurah Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan
8. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UMY
9. Yang Bersangkutan (Pemohon)